

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Yuliasti Leki¹, Amran T. Naukoko², Jacline I. Sumual³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: yuliasileki@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2008-2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSSV.22. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), belanja modal (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), dan secara bersama-sama pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) di Kabupaten Halmahera Barat.

Kata Kunci : pendapatan asli daerah, belanja modal, kinerja keuangan

ABSTRACT

Government financial performance and its level are the results of work that includes the budget and revenue realization using financial indicators set by the bank or provisions for a budget period. The purpose of this study was to find out how the influence of the Regional Original Income and Capital Expenditures on financial performance in West Halmahera Regency in 2008-2017. The analysis technique used in this study is a multiple linear regression model with the help of the SPSSV.22 program. The results of regression analysis show that regional original income (X1) is positive and significant towards financial performance (Y), capital expenditure (X2) has a positive but significant effect on financial performance (Y), and together-regional revenue (X1) and expenditure capital (X2) has a positive and significant effect on financial kinern (Y)in West Halmahera Regency.

Keywords: regional original income, capital expenditures, financial performance.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, kondisi pemerintahan cenderung dinamis. Bermunculan terobosan baru dalam pola pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Termasuk yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang terbatas karena pola yang di anut adalah polasentralisasi, maka semenjak berlakunya undang-undang No 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pola hubungan yang cenderung sentralisasi ini berubah pada pola desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur pemerintahan daerahnya.

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menjunjung pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap Kota maupun Kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 2013).

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan sebagai kinerja keuangan pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran, bentuk dan pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan Pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsial, adil dan transparan. Dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, Pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi Daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dimana kepada Daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar urusan Pemerintah pusat yang di tetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial Pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Halmahera Barat.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan asli daerah

Pengertian PAD berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa PAD adalah pendapatan yang di peroleh Daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan PAD merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Syaiful (2007:2-3), Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama.

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Modal Fisik lainnya

Keuangan Daerah

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti dan Saftiana, 2008).

Kinerja keuangan

Menurut Lohman (2013) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisas. menjelaskan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efesiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh

pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

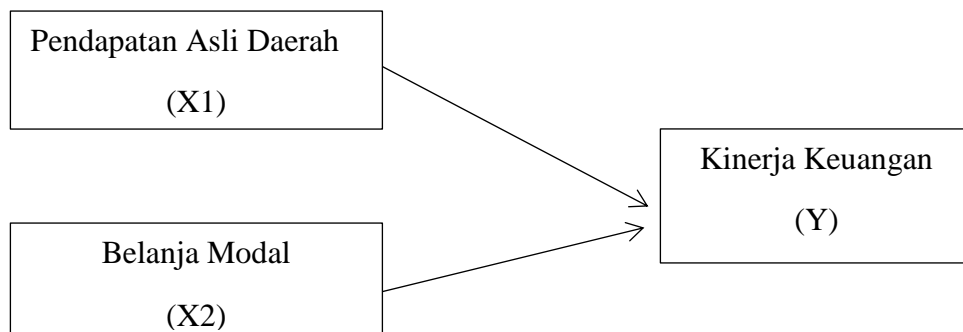
Hubungan pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah di tuntut untuk bias mengembangkan dan meningkatkan PAD nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui cara mengatur kinerja keuangan.

Hubungan belanja modal dengan kinerja keuangan

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun, yang dapat menambah nilai tambah bagi kinerja Keuangan. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Negara dan Daerah yang tercermin didalam belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah. Belanja Modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun, semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan Daerah. Semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk

pernyataan yang menghubungkan dua variable atau lebih. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Barat
2. Diduga bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Barat
3. Diduga bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Halmahera Barat.

2. METODE PENELITIAN

Data dan sumber data

Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder time series. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari data BPS dan BPKAD Halmahera Barat, dokumen-dokumen resmi dari berbagai Instansi Pemerintah.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diartikan sebagai data penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data kuantitatif bersifat dapat diukur dalam suatu skala numerik (Sugiono,2010).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kabupaten Halmahera Barat dan mengambil data di kantor BPKAD.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana (*ordinary least square*). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen (Gujarati, 1999).

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan metode regresi kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{BM} + \epsilon_i$$

tDimana :

Y = Kinerja keuangan

PAD (X1) = pendapatan asli daerah

BM (X2) = belanja modal

I = observasi ke -i

μ = kesalahan yang disebabkan oleh factor acak

α = konstanta

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Hasil analisis regresi linier berganda dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Tabel 1.2 analisis PAD dan belanja modal

Tahun	Pendapatan asli daerah	Belanja modal
2008	3.557.262.649	116.257.107.504
2009	4.269.396.244	96.738.354.617
2010	4.095.849.439	116.257.107.504
2011	5.020.380.000	50.891.078.279
2012	6.800.000.000	112.625.702.100
2013	14.407.600.000,00	151.136.360.961
2014	16.407.600.000	159.597.110.223
2015	31.740.370.000	205.193.012.698
2016	34.315.853.000	203.872.273.750
2017	49.370.918.000	243.115.286.266

Sumber: data (2018)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas menjelaskan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal dari tahun 2008-2017. PAD tahun 2008 mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2009-2017. Sedangkan pada belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2011.

Uji Normalitas

Nilai signifikansi PAD dan belanja modal adalah sebesar $0,132 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai residual telah terdistribusi normal.

Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 1.2 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
pendapatan asli daerah	.327	3.060
belanja modal	.327	3.060

Dependen variabel: kinerja keuangan

Berdasarkan table 4.5 diatas, semua variabel menunjukkan *tolerance* > 0,1, dan nilai VIF < 10, bahwa koefisien *tolerance* variabel pendapatan asli daerah adalah 0,327 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 3,060 lebih kecil dari 10. Koefisien *tolerance* belanja modal adalah 0,327 lebih besar dari 0,1 dan VIF sebesar 0,327 lebih kecil dai 10. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

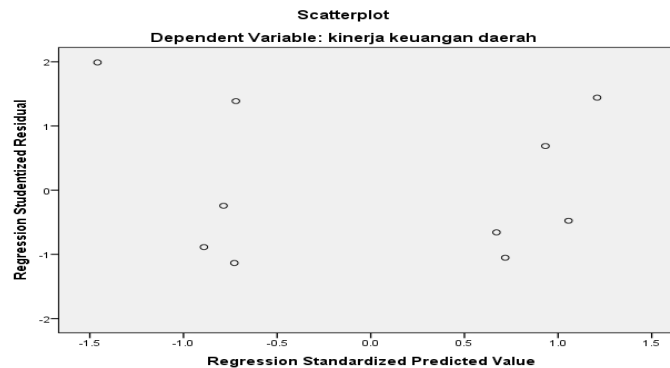
Uji Autokorelasi

Tabel 1.3

Model	R	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
		R Square Change	F Change	df1	df2		
1	.940 ^a	.883	26.511	2	7	.001	2.127

- a. Predictors: (Constant), belanja modal, pendapatan asli daerah
- b. Dependent Variable: kinerja keuangan daerah

Gambar 1



Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa penyebaran residual tidak teratur. Hal tersebut terlihat pada plot yang terpancar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulannya adalah bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas.

Hasil Regresi Linier Berganda Uji F, Uji t dan Koefisien Determinasi R²

Tabel 1.4 uji F Anova

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	122.016	2	061.008	26.511	.001 ^b
Residual	152.084	7	3.155		
Total	274.100	9			

a. Dependen variabel: kinerja keuangan

nilai F hitung sebesar 26,551 dengan signifikansi sebesar 0,001. Terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian berarti H₀ ditolak dan H_a diterima, Artinya Hipotesis Pertama yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan”.

Tabel 1.5 Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	1.615	6.124		1.673	.138		
pendapatan asli daerah	.000	.000	-.610	-2.699	.031	.327	3.060
belanja modal	.047	.028	.373	1.651	.143	.327	3.060

Dependen variabel: kinerja keuangan

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah 0,000, nilai koefisien belanja modal (X2) adalah 0,047 keduanya bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah (X1), dan belanja modal (X2) positif berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y).

**Tabel 1.6 Koefisien Korelasi (R)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.883	.850	.06516	.883	2.127

a. Dependen variable: kinerja keuangan

Nilai R sebesar 0,940. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), dan Belanja Modal (X_2), Kinerja Keuangan Daerah (Y), karena nilai R hampir mendekati 1.

Pembahasan

Dari hasil penelitian diketahui nilai F hitung sebesar 26,511 dengan signifikan sebesar 0,001. Terlihat bahwa nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $\text{sig} < 0,05$ dan hasil ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Belanja Modal (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan Daerah (Y). Ini berarti Hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Belanja Modal (X_2) diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Daerah (Y)”.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui nilai t hitung sebesar -2,699 dengan nilai signifikansi sebesar 0,031. Terlihat bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $\text{Sig} > 0,05$ dan hasil menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y). Ini berarti Hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa “Belanja Modal diduga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y)” tidak terbukti atau ditolak.

Perkembangan Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa dalam uji hipotesis gabungan tiga indikator rasio pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan hasil yang menunjukkan bahwa secara signifikan tidak berbeda kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah dan Belanja Modal pada periode tahun 2008-2017 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai Pembangunan Daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat masih relative sangat kecil karena PAD $< 50\%$ dalam membiayai pembangunan Daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan Daerah di Kabupaten Halmahera Barat.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Halmahera Barat.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal Kabupaten Halmahera Barat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja modal secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Modal Berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah daerah lebih khusus Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat supaya dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah dan memperbaiki kinerja keuangan Daerah. Agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan, dengan menggali berbagai macam potensi sumber pendapatan daerah, misalnya mendirikan BUMD sektor potensi seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, agroindustri dan agrowisata serta sektor jasa

DAFTAR PUSTAKA

- Cherry Dhia Wenny, 2012.** *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.* STIE MDP. Sumatera Selatan. [jurnal].
- Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan Daerah, 2013.** *Data Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal.*
- Dinas pendapatan pengelolaan keuangan Daerah. Kabupaten Halmahera Barat, 2013.**
- Ghozali, . 2009.** *Ekonometrika, teori konsep dan aplikasi dengan spss* Semarang. Badan penerbit Universitas di Ponegoro.
- Gudjarati. 1999.** *Ekonometrika dasar, terjemahan Sumarno Zain,* Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004.** *Akuntansi Sektor publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Selemba Embat.* Jakarta.
- Halim.2007.** *Pengukuran kemandirian Keuangan Kinerja Keuangan.* Andi. Yogyakarta.
- Halim, dan Kusufi. 2012.** *Pengeluaran Belanja Modal.* Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Syaiful. 2007.** *Pengertian dan Perlakuan Akuntasni Belanja Barang dan Belanja Modal dalam aidah Akuntansi Pemerintah.*
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 pasal 157.** *Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.* Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004* tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pedoman penguus pertanggung jaaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata Cara penyusunan APBD.

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004. tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Negara kesatuan Repoblik Indonesia Menyelenggarakan pemerintah pemerintah Negara dan pembangunan Nasional Tahun 1945.

Undang-Undang 1 Tahun 2013. Tentang Pemekaran Kabupaten Halmahera Barat.